

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2022-2024

Ade Budi Setiawan, Agis Nuraeni, Hania Setiana, Hilda Aini Luthfiah, Regita Cahyani, Sahl Rakhaningrum

Universitas Djuanda

Email : ade.budi.setiawan@unida.ac.id, agisnuraeni1@gmail.com,
haniasetianaa@gmail.com, hildaluthf@gmail.com, gitachyn19@gmail.com,
sahlrakhaningrum@gmail.com

Abstrak

Kinerja keuangan pemerintah daerah menjadi salah satu indikator penting dalam era desentralisasi fiskal karena ini menunjukkan kemampuan daerah untuk mengelola dana secara mandiri dan berkelanjutan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memeriksa kinerja keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama periode 2022–2024 dengan mempertimbangkan ketahanan dan kemandirian fiskal selama pemulihan ekonomi pasca pandemi. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 – 2024. Hasil analisis menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara umum relatif stabil, dengan tingkat kemandirian fiskal yang kuat dan kontribusi PAD yang signifikan selama periode 2022–2024. Namun demikian, untuk menjaga ketahanan fiskal yang berkelanjutan, masih ada masalah dengan pengelolaan struktur belanja dan upaya untuk meningkatkan efisiensi anggaran. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan pengelolaan keuangan, serta memberikan kontribusi bagi pengembangan literatur terkait analisis kinerja keuangan dan ketahanan fiskal pemerintah daerah.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan, Rasio Keuangan Daerah, Laporan keuangan pemerintah Daerah (LKPD)

Article history

Received : Januari 2026

Reviewed: Januari 2026

Published: Januari 2026

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Abstract

The financial performance of local governments is one of the important indicators in the era of fiscal decentralization because it shows the region's ability to manage funds independently and sustainably. The purpose of this study is to examine the financial performance of the DKI Jakarta Provincial Government during the period 2022–2024, considering fiscal resilience and independence during the post-pandemic economic recovery. The research method used in this study is quantitative descriptive, utilizing secondary data in the form of the Regional Government Financial Statements (LKPD) of DKI Jakarta Province for the years 2022–2024. The analysis results indicate that the financial performance of the DKI Jakarta Provincial Government is generally relatively stable, with strong fiscal independence and a significant contribution from Regional Original Revenue (PAD) during the period 2022–2024. However, to maintain sustainable fiscal resilience, there are still issues with managing the expenditure structure and efforts to improve budget efficiency. This research is expected to serve as an evaluation tool for local governments in formulating financial management policies, and to contribute to the development of literature related to financial performance analysis and fiscal resilience of local governments.

Keywords: Financial Performance, Regional Financial Ratios, Local Government Financial Reports (LKPD)

PENDAHULUAN

Dalam kerangka desentralisasi fiskal di Indonesia, pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota diberikan kewenangan yang lebih luas untuk mengelola sumber daya keuangannya secara mandiri. Meski demikian, kemampuan suatu daerah untuk menjaga ketahanan fiskal, yaitu kapasitas dalam membiayai kebutuhan publik secara berkelanjutan tanpa ketergantungan yang tinggi pada dana transfer dari pemerintah pusat, masih menjadi isu utama dalam tata kelola keuangan daerah (Septian Asriadi Putra et al., 2024).

Sebagai pusat pemerintahan dan wilayah metropolitan terbesar di Indonesia, DKI Jakarta memiliki posisi strategis dalam sistem fiskal nasional. Kinerja keuangan Provinsi DKI Jakarta tidak hanya berdampak pada efektivitas layanan publik dan

pembangunan infrastruktur, tetapi juga memengaruhi dinamika ekonomi, sosial, serta pemerataan kesejahteraan di wilayah sekitar. Oleh karena itu, penting untuk menilai sejauh mana Jakarta mampu mempertahankan ketahanan fiskalnya, khususnya pada masa pemulihan ekonomi pasca-pandemi.

Berbagai penelitian empiris mengenai kinerja keuangan daerah menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), tingkat kemandirian fiskal, efisiensi belanja, dan struktur alokasi anggaran memiliki peran penting dalam menentukan ketahanan fiskal. Beberapa studi menemukan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap tingkat efisiensi dan kemandirian keuangan pemerintah daerah (Hariani & Febriyastuti, 2020). Selain itu, penelitian di 34 provinsi mengungkapkan bahwa derajat otonomi fiskal dan tingkat ketergantungan terhadap dana pusat turut memengaruhi besaran belanja modal daerah (Sutjipto et al., 2019).

Kajian lain mengenai keberlanjutan fiskal (*fiscal sustainability*) juga menekankan bahwa komposisi pendapatan, termasuk proporsi PAD dan besaran transfer pusat, serta distribusi belanja antara kebutuhan rutin dan pembangunan, menjadi faktor penting dalam menentukan kemampuan fiskal jangka panjang suatu daerah (Hidayat & Suseno, 2025). Kendati demikian, kajian empiris yang secara khusus menilai ketahanan fiskal DKI Jakarta dalam periode terbaru, yakni 2022–2024, masih sangat terbatas. Sebagian besar penelitian sebelumnya hanya menyoroti periode pra-pandemi atau masa pandemi, sehingga belum menggambarkan situasi fiskal Jakarta pada fase pemulihan ekonomi. Hal ini menunjukkan adanya gap penelitian, terutama untuk memahami kondisi fiskal Jakarta setelah menghadapi tekanan ekonomi dan perubahan kebijakan fiskal nasional.

Berdasarkan kondisi tersebut, artikel ini berupaya mengisi kekosongan tersebut melalui analisis menyeluruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama 2022–2024. Dengan menggunakan indikator seperti rasio PAD, tingkat kemandirian fiskal, efisiensi belanja, serta proporsi belanja rutin dan modal, penelitian ini bertujuan menilai apakah Jakarta berada dalam kondisi fiskal yang stabil dan tangguh. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pembuat kebijakan serta memperkaya literatur terkait keberlanjutan fiskal pada pemerintah daerah, khususnya di wilayah perkotaan besar.

TINJAUAN PUSTAKA

Keuangan daerah mencakup semua hak dan kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai secara moneter, termasuk segala kekayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tanggung jawab tersebut. Pengelolaan keuangan pemerintah daerah harus transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan bertanggung jawab, menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Sebagian besar orang percaya bahwa keuangan daerah adalah alat utama pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas

pelayanan publik. Menurut Haryanto & Astuti (2015) dalam Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan, keuangan daerah menunjukkan kemampuan daerah untuk membiayai pembangunan dan tingkat kemandirian daerah dalam desentralisasi fiskal. Kemampuan daerah untuk mengumpulkan pendapatan secara mandiri berkorelasi positif dengan kekuatan fiskalnya.

Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah membentuk struktur keuangan daerah. Ketergantungan yang tinggi pada dana transfer menunjukkan kapasitas fiskal daerah yang lemah, komponen pendapatan, khususnya PAD, merupakan indikator utama kemandirian fiskal. Pada bagian belanja, Rahayu et al. (2023) mengatakan bahwa proporsi antara belanja modal dan belanja operasi menunjukkan prioritas kebijakan daerah; belanja modal memainkan peran penting dalam meningkatkan pembangunan jangka panjang. Secara keseluruhan, konsep keuangan daerah mencakup aspek administratif dan kemampuan pemerintah daerah untuk mempertahankan stabilitas fiskal. Menurut Fitriani et al. (2019), ketahanan fiskal daerah didasarkan pada pengelolaan pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang efektif.

Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja keuangan daerah adalah ukuran penting untuk mengevaluasi seberapa efektif, efisien, dan akuntabel pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Menurut Rahayu et al. (2023), kinerja keuangan daerah menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah mampu menggunakan sumber daya finansial untuk mencapai tujuan pembangunan dan pelayanan publik. Laporan keuangan daerah (LKPD) adalah alat utama untuk mengevaluasi kinerja ini karena menyajikan informasi menyeluruh tentang pendapatan, belanja, pembiayaan, dan posisi keuangan daerah secara keseluruhan. Beberapa indikator yang umum digunakan untuk mengukur kinerja keuangan daerah antara lain adalah pendapatan Daerah, belanja Daerah surplus/defisit dan rasio Keuangan.

Rasio Desentralisasi Fiskal

Ketika pendapatan lokal dibagi dengan total pendapatan lokal, kita dapat menemukan tingkat desentralisasi. Rasio ini menunjukkan persentase kontribusi pendapatan lokal terhadap total pendapatan lokal. Tingkat kontribusi pendapatan lokal meningkatkan kemampuan pemerintah daerah untuk menerapkan desentralisasi (Utari et al., 2023)

$$\text{Rasio derajat desentralisasi fiskal: } \frac{PAD}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

Tabel 1. Skala interval rasio derajat desentralisasi fiskal

Skala rasio derajat desentralisasi fiskal	Kemampuan keuangan daerah
00.00 – 10.00 %	Sangat kurang
10.01 – 20.00 %	Kurang

20.01 – 30.00 %	Cukup
30.01 – 40.00 %	Sedang
40.01 – 50.00 %	Baik
> 50.00%	Sangat Baik

Sumber: Fathah (2017)

Rasio Kemandirian Fiskal

Mengukur kemampuan daerah membiayai belanja melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan total pendapatan. Semakin tinggi rasio ini, semakin mandiri fiskal suatu daerah. Membandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan pendapatan dari sumber lain, seperti pinjaman dan bantuan pemerintah pusat (transfer pusat), menunjukkan kemandirian keuangan daerah.

$$\text{Rasio kemandirian fiskal: } \frac{PAD}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi}} \times 100\%$$

Tabel 2. Skala interval rasio kemandirian dan pola hubungan

Kemampuan Daerah	Persentase Kemandirian	Kemandirian
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber: Fathah (2017)

Rasio Efektivitas PAD

Menilai pencapaian target pendapatan daerah. Tingkat efektivitas yang tinggi menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menghimpun sumber daya lokal.

$$\text{Rasio Efektivitas: } \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Tabel 3. Kriteria Efektivitas Daerah

Persentase Efektifitas	Kriteria Efektifitas
<100%	Tidak Efektif
100%	Efektifitas Berimbang
>100%	Efektif

Sumber: Fathah (2017)

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Mengukur seberapa optimal belanja digunakan dibandingkan dengan total pendapatan atau anggaran. Efisiensi yang tinggi mencerminkan pengelolaan anggaran yang baik.

$$\text{Rasio Efisiensi: } \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 4. Kriteria Efisiensi Keuangan Daerah

Persentase Efektifitas	Kriteria Efisiensi
<100%	Efisiensi
100%	Efisiensi Berimbang
>100%	Tidak Efisiensi

Sumber: Fathah (2017)

Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan menunjukkan seberapa baik pemerintah daerah mempertahankan dan mengoptimalkan capaian kinerjanya dari tahun ke tahun.

$$\text{Rasio Pertumbuhan Pendapatan} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi Pendapatan } X_{n-1}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Pertumbuhan Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi Belanja } X_{n-1}} \times 100\%$$

Keterangan: X_n = Tahun yang dihitung X_{n-1} = tahun Sebelumnya**Rasio Kerasian Belanja**

Rasio kerasian belanja, yang terdiri dari dua perhitungan, yaitu rasio belanja operasi dan rasio belanja modal, menunjukkan bagaimana pemerintah daerah mengalokasikan dananya secara optimal untuk belanja operasi dan belanja modal. Rumus untuk rasio belanja operasi dan rasio belanja modal berikut ini.

$$\text{Rasio Belanja Operasi: } \frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Modal: } \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 5. Kerasian Belanja

Perbandingan	Kriteria Kerasian
Jumlah Belanja Operasi > Jumlah Belanja Modal	Kurang Baik
Jumlah Belanja Operasi = Jumlah Belanja Modal	Cukup Baik
Jumlah Belanja Operasi < Jumlah Belanja Modal	Baik – Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM dalam Sukur (2022)

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah dokumen resmi yang menunjukkan posisi keuangan, kinerja, dan arus kas pemerintah daerah. Itu dibuat menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berfungsi untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah (Rahayu et al., 2023). Komponen utama LKPD adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggambarkan pendapatan, belanja, dan surplus atau defisit anggaran, neraca menunjukkan aset, kewajiban, dan total anggaran, laporan perubahan saldo anggaran adalah laporan yang menjelaskan perubahan saldo anggaran lebih selama periode waktu tertentu, laporan operasional/ arus kas menunjukkan jumlah uang yang masuk dan keluar dari operasi, investasi, dan pembiayaan dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) adalah kumpulan kebijakan akuntansi dan poin penting yang dijelaskan secara menyeluruh (Fitriani et al., 2019).

LKPD berfungsi sebagai sumber data utama untuk menilai kinerja keuangan, kemandirian fiskal, dan ketahanan fiskal daerah. Dengan menganalisis LKPD, peneliti dapat melihat bagaimana pendapatan daerah dikelola, struktur belanja, dan kapasitas daerah untuk menghadapi defisit atau tekanan fiskal (Nadofah dkk., 2020).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kuantitatif untuk menganalisis laporan keuangan dengan menggunakan berbagai rasio keuangan. Data yang dianalisis bersumber dari data sekunder berbentuk deret waktu (*time series*), yang diambil dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah DKI Jakarta 2022–2024, Selanjutnya, data dianalisis dengan menghitung sejumlah rasio keuangan untuk menilai kinerja dan ketahanan fiskal daerah. Analisis LKPD Provinsi DKI Jakarta tahun 2022–2024 dilakukan melalui pengukuran rasio kemandirian fiskal, rasio ketergantungan terhadap dana transfer, rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), rasio efisiensi belanja, serta analisis pertumbuhan pendapatan dan belanja daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rasio Desentralisasi Fiskal

Tahun	Pendapatan asli daerah (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)	Rasio DDF	Keterangan
2022	Rp. 45.608.404.729.501	Rp.69.290.479.172.308	68%	Sangat Baik

2023	Rp.	Rp.71.065.534.207.722	69%	Sangat Baik
	49.139.745.715.234			
2024	Rp.	Rp.72.952.092.296.153	70%	Sangat Baik
	50.742.019.272.748			

Tabel 6. Hasil Rasio Desntralisasi Fiskal

Sumber: (Data diolah 2025)

Berdasarkan hasil perhitungan rasio desentralisasi fiskal Provinsi DKI Jakarta selama periode 2022–2024, dapat diketahui bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah berada pada tingkat yang sangat tinggi. Pada tahun 2022, rasio desentralisasi fiskal mencapai 68%, yang menunjukkan bahwa sebagian besar pendapatan daerah DKI Jakarta bersumber dari PAD. Selanjutnya, pada tahun 2023 rasio tersebut mengalami peningkatan menjadi 69%, mencerminkan adanya penguatan kapasitas fiskal daerah dalam menghimpun pendapatan secara mandiri. Pada tahun 2024, rasio desentralisasi fiskal kembali meningkat menjadi 70%, yang menandakan tren kemandirian fiskal yang semakin kuat.

Rasio Kemandirian Fiskal

Tabel 8. Hasil Rasio Kemandirian Fiskal

Tah un	Realisasi PAD (Rp)	Pendapatan Transfer	Rasio Kemand irian	Pola Hubun gan
2022	Rp. 45.608.404.729. 501	Rp 8.860.858.779.549	242%	Delegat if
2023	Rp. 49.139.745.715. 234	Rp 20.159.634.672.034	244%	Delegat if
2024	Rp. 50.742.019.272. 748	Rp 21.620.905.241.381	235%	Delegat if

Sumber: (Data diolah 2025)

Hasil perhitungan rasio kemandirian fiskal menunjukkan bahwa Provinsi DKI Jakarta memiliki tingkat kemandirian fiskal yang sangat tinggi selama periode pengamatan. Pada tahun 2022, rasio kemandirian fiskal tercatat sebesar 242%, meningkat menjadi 244% pada tahun 2023, dan meskipun mengalami sedikit penurunan pada tahun 2024 menjadi 235%, nilai tersebut tetap berada pada kategori tinggi dengan pola hubungan delegatif.

Rasio kemandirian yang jauh melebihi 100% menandakan bahwa PAD yang dimiliki DKI Jakarta secara signifikan lebih besar dibandingkan pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Kondisi ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak hanya mampu membiayai kebutuhan belanjanya secara mandiri, tetapi juga memiliki keleluasaan dalam merumuskan kebijakan fiskal tanpa ketergantungan yang tinggi pada intervensi pemerintah pusat. Dengan demikian, tingkat kemandirian fiskal yang tinggi ini menjadi indikator kuat ketahanan fiskal daerah.

Rasio Efektifitas PAD

Tabel 9. Hasil Rasio Efektifitas PAD

Tahun	Realisasi PAD	Target Penerimaan PAD	Efektifitas (%)	Kemampuan Keuangan
2022	Rp. 45.608.404.729.501	Rp.55.662.834.753.592	81%	Kurang efektif
2023	Rp. 49.139.745.715.234	Rp 48.442.043.848.831	101%	Sangat Efektif
2024	Rp. 50.742.019.272.748	Rp 50.466.744.400.403	101%	Sangat Efektif

Sumber: (Data diolah 2025)

Analisis rasio efektivitas PAD menunjukkan adanya variasi kinerja dalam pencapaian target pendapatan daerah selama periode penelitian. Pada tahun 2022, rasio efektivitas PAD tercatat sebesar 81%, yang berarti realisasi PAD belum mampu mencapai target yang ditetapkan dan berada pada kategori kurang efektif. Hal ini mengindikasikan adanya kendala dalam optimalisasi penerimaan PAD, yang dapat disebabkan oleh faktor ekonomi maupun kebijakan pemungutan pendapatan daerah.

Namun, pada tahun 2023 dan 2024, rasio efektivitas PAD masing-masing meningkat menjadi 101%. Pencapaian ini menunjukkan bahwa realisasi PAD telah melampaui target yang direncanakan, sehingga masuk dalam kategori sangat efektif. Peningkatan efektivitas ini mencerminkan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam perencanaan dan pengelolaan pendapatan, serta menunjukkan kemampuan adaptasi fiskal pasca periode pemulihan ekonomi.

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Tabel 10. Hasil Rasio Efiseinsi Keuangan Daerah

Tahun	Realisasi Belanja	Realisasi Pendapatan	Rasio Efisiensi	
2022	64.380.358.560.086	67.290.479.172.308	96%	Sangat Efisien
2023	66.414.163.147.914	1.065.534.207.722	93%	Sangat Efisien
2024	61.063.848.818.057	61.235.824.747.633	100%	Sangat Efisien

Sumber: (Data diolah 2025)

Hasil analisis rasio efisiensi keuangan daerah menunjukkan bahwa pengelolaan belanja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama periode 2022–2024 tergolong sangat efisien. Pada tahun 2022, rasio efisiensi tercatat sebesar 96%, kemudian menurun menjadi 93% pada tahun 2023, dan mencapai 100% pada tahun 2024. Seluruh nilai rasio tersebut berada dalam kategori sangat efisien. Rasio efisiensi yang berada di bawah atau mendekati 100% menunjukkan bahwa realisasi belanja daerah masih berada dalam batas kemampuan pendapatan yang tersedia. Kondisi ini mencerminkan pengendalian belanja yang baik serta kemampuan pemerintah daerah dalam menyesuaikan pengeluaran dengan kapasitas fiskal yang dimiliki. Dengan demikian, efisiensi belanja yang tinggi berkontribusi positif terhadap stabilitas dan ketahanan fiskal daerah.

Rasio Pertumbuhan

Tabel 11. Hasil Rasio Pertumbuhan

Keterangan	2022	2023	2024
Pendapatan Daerah	67.290.479.172.308	71.065.534.207.722	72.952.092.296.153
Pertumbuhan Pendapatan Daerah	2,62%	5,61%	3%
Belanja Operasi	55.542.186.969.752	57.556.903.079.616	58.623.935.516.823
Pertumbuhan Belanja Operasi	2,99%	3,62%	2%
Belanja Modal	8.808.194.842.704	8.857.260.068.298	11.004.785.255.543
Pertumbuhan Belanja Modal	28,29%	(0,55%)	24%

Sumber: (Data diolah 2025)

Analisis rasio pertumbuhan menunjukkan bahwa pendapatan daerah Provinsi DKI Jakarta mengalami pertumbuhan positif selama periode penelitian, meskipun dengan tingkat pertumbuhan yang fluktuatif. Pertumbuhan pendapatan daerah tercatat sebesar 2,62% pada tahun 2022, meningkat menjadi 5,61% pada tahun 2023, dan kemudian melambat menjadi 3% pada tahun 2024. Pola ini menunjukkan adanya pemulihan pendapatan pasca tekanan ekonomi, meskipun laju pertumbuhan cenderung stabil. Pada sisi belanja, belanja operasi menunjukkan pertumbuhan yang relatif stabil setiap tahunnya, sementara belanja modal mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Belanja modal meningkat tajam pada tahun 2022 sebesar 28,29%, mengalami penurunan pada tahun 2023 sebesar -0,55%, dan kembali meningkat pada tahun 2024 sebesar 24%. Fluktuasi ini mengindikasikan adanya penyesuaian kebijakan pembangunan dan prioritas anggaran daerah yang bersifat dinamis.

Rasio Kecerassian Belanja

Tabel 12. Hasil Rasio Kecerassian

keterangan	2022	2023	2024
Total Belanja	55.542.186	57.556.903.07	58.623.935.516.
Operasi	.969.752	9.616	823
Total Belanja	8.808.194.	8.857.260.068.	11.004.785.255.
Modal	842.704	298	543
Total Belanja	64.380.358	66.414.163.14	69.628.720.772.
Daerah	.560.086	7.914	366
Rasio Belanja	86%	87%	84%
Operasi			
Rasio belanja	14%	14%	16%
Modal			
Kategori	Kurang Seimbang	Kurang Seimbang	Kurang Seimbang

Sumber: (Data diolah 2025)

Berdasarkan hasil perhitungan rasio keserasian belanja, terlihat bahwa struktur belanja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama periode 2022–2024 masih didominasi oleh belanja operasi. Rasio belanja operasi tercatat sebesar 86% pada tahun 2022, meningkat menjadi 87% pada tahun 2023, dan sedikit menurun menjadi 84% pada tahun 2024. Sebaliknya, rasio belanja modal relatif rendah, yaitu sebesar 14% pada tahun 2022 dan 2023, serta meningkat menjadi 16% pada tahun 2024. Komposisi belanja tersebut menunjukkan bahwa alokasi anggaran masih lebih banyak digunakan untuk kebutuhan operasional dibandingkan belanja modal. Berdasarkan kriteria keserasian belanja, kondisi ini dikategorikan kurang seimbang, karena proporsi belanja operasi jauh lebih besar dibandingkan belanja modal. Meskipun belanja operasi penting untuk menjaga kelangsungan pelayanan publik,

proporsi belanja modal yang relatif rendah dapat membatasi kemampuan daerah dalam mendorong pembangunan jangka panjang.

SIMPULAN

Berdasarkan atas temuan penganalisisan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa ketahanan fiskal DKI Jakarta berada dalam kategori sangat baik. Hal ini tercermin dari rasio desentralisasi fiskal yang konsisten di atas 68%, menunjukkan kemampuan yang tinggi dalam menghasilkan PAD secara mandiri tanpa ketergantungan signifikan pada transfer Pemerintah pusat. Kemandirian fiskal tergolong sangat tinggi dengan rasio di atas 200%. Efektivitas PAD mengalami peningkatan signifikan dari 81% pada tahun 2022 menjadi 101%. Rasio efisiensi keuangan daerah sangat baik selama tiga tahun terakhir, menandakan bahwa realisasi belanja terkendali dan sesuai kemampuan pendapatan yang tersedia. Pertumbuhan pendapatan dan belanja daerah stabil dan mengarah positif. Namun, belanja modal yang fluktuatif mengindikasikan adanya perubahan dalam kebijakan pembangunan. Yang perlu menjadi perhatian adalah ketidakseimbangan struktur anggaran, di mana belanja operasional mendominasi (84-87%), sementara porsi untuk belanja modal sangat terbatas (14-16%). Kondisi ini mencerminkan orientasi anggaran yang masih lebih berat pada pembiayaan rutin, bukan pada investasi untuk masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Fathah. R. N. (2017). *Analisis Rasio Keuangan Untuk Penilaian Kinerja Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul*. Jurnal EBBANK, 1(8), 33–48.
- Fitriani, D., Hafizrianda, Y., & Purba Riani, I. A. (2019). ANALISIS KEMANDIRIAN FISKAL DI KABUPATEN JAYAPURA. KEUDA (Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah), 3(3). <https://doi.org/10.52062/keuda.v3i3.702>
- Hariani, E., & Febriyastuti, R. (2020). *The Effect of Fiscal Stress, Original Local Government Revenue and Capital Expenditures on Efficiency Ratio of Government Independence Performance*. Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan, 12(1). <https://doi.org/10.17977/um002v12i12020p018>
- Haryanto, J. T., & Astuti, E. S. (2015). DESENTRALISASI FISKAL DAN PENCIPTAAN STABILITAS KEUANGAN DAERAH. Kajian Ekonomi Dan Keuangan, 13(1), 50–62. <https://doi.org/10.31685/kek.v13i1.88>
- Hidayat, M. F., & Suseno, D. A. (2025). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberlanjutan Fiskal Pemerintah Daerah di Indonesia*. 7(1).

- Rahayu, S., Yudi, Y., & Rahayu, R. (2023). Local government performance: Financial condition perspective. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 10(6), 395–408. <https://doi.org/10.22437/ppd.v10i6.11779>
- Septian Asriadi Putra, Verri Riyanto, Annisa Rachman Supartono, Josephine Emmanuel, Ikram Azhar Hagi, & Mochamad Andi Nurfauzi. (2024). RELEVANSI KEMANDIRIAN FISKAL DAERAH: SEBUAH TINJAUAN. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*. <https://ejournal.ipdn.ac.id/jtpm>
- Sukur, D. P., Majid, J., Suhartono, S., & Aditiya, R. (2022). ANALISIS KINERJA KEUANGAN SEBAGAI BAROMETER KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAROS SULAWESI SELATAN. *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review*, 2(2), 152–165. <https://doi.org/10.24252/isafir.v2i2.23747>
- Sutjipto, H., Suci, S. C., & Umbara, Y. S. (2019). Analisis Desentralisasi Fiskal terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah di Indonesia. *Substansi: Sumber Artikel Akuntansi Auditing dan Keuangan Vokasi*, 3(2), 104. <https://doi.org/10.35837/subs.v3i2.609>
- Utari, R., Nursyabani, A., In, H., Rizka, R. B., & Kurniawan, S. (2023). ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DILIHAT DARI RASIO DERAJAT DESENTRALISASI FISKAL, RASIO KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DAN RASIO EFEKTIFITAS: West Lampung Regency Government for Fiscal Year 2021-2022. *JURNAL EKONOMI BISNIS DAN MANAJEMEN (EKO-BISMA)*, 2(2), 204–211. <https://doi.org/10.58268/eb.v2i2.66>